

Strategi Kepala Sekolah dalam Menumbuhkan Budaya Anti-Korupsi Di SMP Miftahul Ulum Bunder Pancoran Bondowoso

**Ifayatul Lailiyah¹, Feri Febriyanti², Iffah Annisa³, Yeni Tri Nur
Rahmawati⁴**

¹²³⁴**Iai at-taqwa bondowoso, Indonesia**

Email: ivayatullailiyah624@gmail.com¹, ferifebrivantibws@gmail.com²,
iffahannisa.azaf@gmail.com², yenitrinurrahmawati@yahoo.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi kepala Sekolah dalam menumbuhkan budaya anti-korupsi di SMP Miftahul Ulum Bunder Pancoran Bondowoso. Pendidikan anti-korupsi merupakan upaya penting dalam membangun generasi berintegritas yang bebas dari praktik kecurangan. Kepala Sekolah memiliki peran strategis dalam menginternalisasikan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab melalui kurikulum, keteladanan, tata kelola transparan, serta keterlibatan stakeholder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepala Sekolah dalam membangun budaya anti-korupsi meliputi: (1) integrasi nilai anti-korupsi ke dalam kurikulum; (2) keteladanan kepala madrasah dan guru; (3) tata kelola keuangan yang transparan; (4) penguatan partisipasi guru, siswa, komite, dan orang tua; serta (5) monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi madrasah lain dalam membangun sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: kepala sekolah, budaya anti-korupsi, SMP Miftahul Ulum

Abstrack

This study aims to describe the principal's strategies in fostering an anti-corruption culture at SMP Miftahul Ulum Bunder Pancoran Bondowoso. Anti-corruption education is an important effort in building a generation of integrity

that is free from fraudulent practices. The principal plays a strategic role in internalizing the values of honesty, trustworthiness, and responsibility through curriculum design, exemplary behavior, transparent governance, and stakeholder involvement. This research uses a descriptive qualitative approach with interview, observation, and documentation techniques. The results show that the principal's strategies in developing an anti-corruption culture include: (1) integrating anti-corruption values into the curriculum; (2) exemplifying integrity by the principal and teachers; (3) implementing transparent financial management; (4) strengthening the participation of teachers, students, the school committee, and parents; and (5) conducting continuous monitoring and evaluation. This study is expected to serve as a reference for other schools in developing a clean, transparent, and accountable education system.

Keywords: madrasah principal, anti-corruption culture, SMP Miftahul Ulum

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi masalah krusial di Indonesia dan merambah ke berbagai sektor, termasuk pendidikan. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan dana pendidikan, baik berupa dana BOS maupun pembangunan sarana-prasarana (Rukiyati, 2018:45). Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya serius dalam membangun budaya anti-korupsi di lembaga pendidikan.

Kondisi tersebut menandakan perlunya upaya serius dan sistematis dalam membangun budaya anti-korupsi di lembaga pendidikan. Pendidikan seharusnya tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga wahana pembentukan karakter, terutama dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan amanah. Sekolah dan madrasah merupakan ruang yang strategis dalam pembentukan budaya tersebut karena peserta didik pada usia sekolah sedang berada pada tahap pencarian jati diri dan pembentukan nilai-nilai moral yang kuat.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran ganda: mengajarkan ilmu pengetahuan sekaligus menanamkan nilai-nilai moral. Nilai

Islam seperti amanah, jujur, dan adil sejalan dengan prinsip anti-korupsi (Syafi'i, 2017:122). Di SMP Miftahul Ulum Bunder Pancoran Bondowoso, kepala Sekolah menempati posisi penting dalam membentuk budaya sekolah yang berintegritas, karena setiap kebijakan dan teladan yang ditunjukkan akan memengaruhi seluruh warga sekolah (Hasanah, 2019:88).

Budaya anti-korupsi tidak dapat terbentuk hanya melalui ceramah atau peraturan tertulis. Ia memerlukan proses internalisasi nilai melalui keteladanan, pembiasaan, dan pengawasan yang konsisten. Pendidikan anti-korupsi di sekolah dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap mata pelajaran, terutama dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), Akidah Akhlak, dan Fiqih. Guru dapat menanamkan contoh konkret seperti pentingnya amanah dalam menjaga titipan, larangan mengambil yang bukan haknya, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dengan demikian, nilai anti-korupsi menjadi bagian dari karakter peserta didik, bukan sekadar pengetahuan teoritis.

Selain itu, partisipasi seluruh warga madrasah sangat penting. Budaya anti-korupsi tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh kepala madrasah tanpa dukungan guru, staf, dan siswa. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang harmonis antara pimpinan, guru, siswa, dan masyarakat sekitar. Misalnya, melalui kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan rasa tanggung jawab, seperti organisasi siswa (OSIS), pramuka, dan kegiatan sosial yang melibatkan transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan dana kegiatan. Keterlibatan aktif seluruh unsur madrasah akan memperkuat nilai-nilai integritas secara kolektif.

Upaya membangun budaya anti-korupsi di sekolah juga harus disertai sistem pengawasan yang efektif. Kepala sekolah perlu menerapkan prinsip manajemen berbasis akuntabilitas, di mana setiap program dan penggunaan anggaran dapat di pertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi informasi keuangan kepada guru dan komite sekolah dapat menjadi bentuk pencegahan korupsi sejak dini. Selain itu, evaluasi rutin terhadap kinerja guru dan staf dalam aspek integritas perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi di sektor pendidikan merupakan ancaman serius terhadap kualitas generasi bangsa. Sekolah, sebagai lembaga pendidikan Islam, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjadi pelopor gerakan anti-korupsi melalui penanaman nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan amanah. Peran kepala Sekolah sangat vital dalam mewujudkan hal ini, karena kepemimpinan yang berintegritas akan menjadi pondasi kuat bagi terciptanya budaya sekolah yang bersih dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ditetapkan di SMP Miftahul Ulum Bunder Pancoran Bondowoso, karena sekolah ini dikenal aktif dalam mengembangkan program pendidikan karakter serta menekankan transparansi pengelolaan keuangan.

Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, siswa, dan komite sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019:78). Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014:62). Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik (Moleong, 2018:94).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Nilai Anti-Korupsi dalam Kurikulum

Kepala SMP Miftahul Ulum Bunder Pancoran Bondowoso berusaha mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi dalam pembelajaran formal maupun non-formal. Integrasi ini dilakukan dengan cara menyisipkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, guru PAI mengajarkan pentingnya kejujuran dalam ibadah, sedangkan guru PPKn menekankan sikap disiplin sebagai wujud tanggung jawab warga negara.

Selain pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler juga dijadikan sarana efektif dalam menanamkan nilai anti-korupsi. Kegiatan seperti organisasi siswa, pramuka, dan lomba kebersihan kelas memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar tentang tanggung jawab, transparansi, dan kepemimpinan yang jujur. Kepala sekolah berperan sebagai pengarah yang memastikan agar setiap kegiatan tersebut berorientasi pada pembentukan karakter, bukan sekadar kegiatan rutin. Dengan cara ini, siswa belajar menerapkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam konteks nyata, sehingga terbentuk kebiasaan baik yang berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan keagamaan seperti tadarus pagi, shalat dhuha berjamaah, dan kajian kitab kuning juga dijadikan media untuk menanamkan budaya amanah. Dengan demikian, nilai anti-korupsi tidak hanya diajarkan secara kognitif, tetapi juga dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari (Purwanto, 2019:135).

Kegiatan keagamaan juga memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan budaya anti-korupsi di SMP Miftahul Ulum Bunder Pancoran Bondowoso. Tradisi tadarus pagi, shalat dhuha berjamaah, dan kajian kitab kuning menjadi media spiritual yang menanamkan kesadaran akan pentingnya amanah dan larangan berbuat curang. Melalui pembiasaan ini, siswa tidak hanya memahami nilai-nilai anti-korupsi secara kognitif, tetapi juga menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Purwanto, 2019:135). Pembelajaran berbasis nilai spiritual ini memperkuat landasan moral peserta didik agar menjauhi perilaku yang merugikan orang lain.

Dengan demikian, strategi yang dilakukan oleh kepala Sekolah dalam mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi mencerminkan model kepemimpinan yang berorientasi pada pembentukan karakter. Keteladanan, pembiasaan, dan pembelajaran berbasis nilai menjadi tiga pilar utama dalam membangun Sekolah yang berintegritas. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial yang tinggi untuk menolak segala bentuk korupsi dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat.

2. Keteladanan Kepala Madrasah dan Guru

Keteladanan kepala sekolah merupakan faktor dominan dalam pembentukan budaya anti-korupsi. Kepala SMP Miftahul Ulum Bunder Pancoran Bondowoso selalu menekankan transparansi dalam pengelolaan dana Sekolah dengan mengumumkan laporan penggunaan dana BOS dan sumbangan komite secara terbuka. Bahkan, kepala Sekolah memberikan contoh nyata dalam hal kedisiplinan waktu, kesederhanaan dalam berpakaian, serta keterbukaan dalam komunikasi dengan guru dan siswa.

Selain itu, kepala Sekolah menunjukkan keteladanan dalam hal kedisiplinan dan kesederhanaan. Setiap hari, beliau hadir lebih awal ke madrasah untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal. Dalam berpenampilan, kepala madrasah selalu mencontohkan kesederhanaan sebagai cerminan nilai kejujuran dan anti-konsumtivismisme yang sejalan dengan semangat anti-korupsi. Gaya kepemimpinan ini memberi pengaruh besar terhadap guru dan siswa, karena mereka melihat langsung bagaimana prinsip moral dijalankan dalam praktik sehari-hari.

Guru juga diarahkan untuk menjadi role model bagi siswa. Mereka dituntut hadir tepat waktu, mengajar dengan disiplin, dan menghindari praktik pungutan liar. Dengan cara ini, siswa memperoleh contoh nyata tentang bagaimana nilai kejujuran dan tanggung jawab dijalankan (Wibowo, 2020:55).

3. Tata Kelola Keuangan yang Transparan

Salah satu strategi penting kepala sekolah adalah memastikan tata kelola keuangan yang transparan, di SMP Miftahul Ulum Bunder Pancoran, setiap penggunaan dana dicatat secara rinci dan dipublikasikan kepada guru serta komite sekolah. Bahkan, laporan keuangan ditempelkan di papan pengumuman agar dapat diakses oleh semua pihak. Transparansi ini bukan hanya untuk akuntabilitas, tetapi juga sebagai bentuk pendidikan tidak langsung kepada siswa tentang pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana (Firmansyah, 2021:99).

Pelaksanaan transparansi ini diwujudkan dalam bentuk keterbukaan informasi kepada seluruh warga sekolah. Setiap transaksi keuangan dicatat secara rinci dan disusun dalam laporan keuangan bulanan maupun semesteran. Kepala sekolah juga mewajibkan bendahara untuk mempublikasikan laporan keuangan melalui papan pengumuman sekolah, sehingga guru, orang tua, dan

siswa dapat mengetahui penggunaan dana secara terbuka. Langkah ini menjadi bentuk nyata akuntabilitas publik serta media pembelajaran bagi seluruh pihak tentang pentingnya kejujuran dalam mengelola amanah.

Selain pelaporan rutin, kepala madrasah juga mengadakan rapat evaluasi keuangan di setiap akhir semester. Dalam forum ini, setiap penggunaan dana diperiksa kembali bersama komite sekolah untuk memastikan kesesuaian antara laporan dengan bukti transaksi. Proses ini bukan hanya bertujuan administratif, tetapi juga memiliki nilai edukatif dalam menanamkan budaya keterbukaan dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, praktik transparansi keuangan menjadi sarana pendidikan moral bagi guru dan siswa.

Menurut Firmansyah (2021:99), tata kelola keuangan yang transparan bukan hanya mencegah potensi korupsi, tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya antara pimpinan dan masyarakat. Di SMP Miftahul Ulum, keterbukaan ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan orang tua dan masyarakat sekitar terhadap sekolah. Mereka merasa yakin bahwa setiap rupiah yang disumbangkan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan. Transparansi keuangan akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengawasan, tetapi juga sebagai refleksi nyata dari integritas lembaga pendidikan Islam.

4. Penguatan Partisipasi Stakeholder

Strategi berikutnya adalah memperkuat keterlibatan semua unsur dalam Sekolah. Kepala SMP Miftahul Ulum melibatkan guru, siswa, komite, dan orang tua dalam program-program yang berhubungan dengan budaya anti-korupsi. Misalnya, siswa dilatih untuk mengelola keuangan kelas secara jujur dan membuat laporan bulanan. Guru dilibatkan dalam perencanaan anggaran Sekolah, sementara orang tua dan komite sekolah turut serta mengawasi penggunaan dana.

Penguatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) menjadi strategi penting dalam mewujudkan budaya anti-korupsi di SMP Miftahul Ulum Bunder Pancoran Bondowoso. Kepala Sekolah memahami bahwa upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari praktik korupsi tidak dapat dilakukan secara individual. Oleh karena itu, ia berusaha

membangun sinergi dengan guru, siswa, komite sekolah, orang tua, serta masyarakat sekitar agar memiliki komitmen bersama dalam menjaga transparansi dan integritas.

Dalam praktiknya, partisipasi stakeholder diwujudkan melalui pelibatan mereka dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program Sekolah. Misalnya, dalam penyusunan anggaran, kepala Sekolah mengundang guru dan komite sekolah untuk bersama-sama menentukan prioritas penggunaan dana. Dengan melibatkan banyak pihak, keputusan keuangan menjadi lebih objektif dan transparan, sehingga potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir. Guru juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan terkait kebutuhan pembelajaran di kelas, sementara komite sekolah berperan aktif sebagai pengawas eksternal.

Selain guru dan komite, siswa pun dilibatkan dalam kegiatan yang menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Misalnya, melalui program “Manajemen Keuangan Kelas,” siswa diberikan tanggung jawab untuk mengelola kas kelas secara transparan dan membuat laporan keuangan sederhana setiap bulan. Kegiatan ini bukan hanya melatih keterampilan administrasi, tetapi juga menanamkan nilai anti-korupsi sejak dini melalui pembiasaan jujur dalam hal kecil. Orang tua siswa pun turut dilibatkan dalam rapat Sekolah yang membahas laporan kegiatan dan penggunaan dana agar tercipta keterbukaan antara sekolah dan masyarakat.

Kegiatan seminar anti-korupsi juga sering diadakan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan alumni. Dengan keterlibatan semua pihak, budaya anti-korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala Sekolah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama (Hidayat, 2018:201).

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Kepala Sekolah menetapkan indikator keberhasilan budaya anti-korupsi, seperti tingkat kehadiran guru dan siswa, keterbukaan laporan keuangan, serta tidak adanya kasus penyalahgunaan dana. Evaluasi dilakukan secara rutin setiap semester dengan melibatkan komite sekolah.

Monitoring dan evaluasi merupakan aspek penting dalam memastikan keberlanjutan budaya anti-korupsi di SMP Miftahul Ulum Bunder Pancoran

Bondowoso. Kepala Sekolah menetapkan sejumlah indikator keberhasilan yang terukur, seperti tingkat kedisiplinan guru dan siswa, keterbukaan laporan keuangan, serta tidak adanya kasus penyalahgunaan dana di lingkungan Sekolah. Indikator ini menjadi pedoman dalam menilai sejauh mana nilai-nilai anti-korupsi telah terinternalisasi di Sekolah.

Setiap semester, kepala Sekolah bersama tim evaluasi dan komite sekolah melakukan rapat monitoring untuk meninjau hasil pelaksanaan program. Evaluasi tersebut mencakup aspek keuangan, kedisiplinan, serta budaya kerja guru dan tenaga kependidikan. Hasil evaluasi kemudian dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan bahan perbaikan program berikutnya. Selain itu, kepala sekolah juga membuka ruang diskusi internal bagi guru melalui forum refleksi untuk membahas kendala yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai integritas.

Selain itu, kepala sekolah juga melakukan evaluasi internal berupa forum diskusi dengan guru untuk membahas kendala yang dihadapi. Dengan evaluasi ini, kepala sekolah dapat menyusun strategi baru agar program anti-korupsi tetap konsisten (Marzuki, 2020:118).

6. Dampak Implementasi Budaya Anti-Korupsi di SMP Miftahul Ulum

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan positif pada siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Siswa menjadi lebih disiplin dalam hal kehadiran, tidak mudah menyontek, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Guru menjadi lebih profesional dan transparan dalam mengelola kegiatan kelas. Orang tua merasa lebih percaya terhadap sekolah karena adanya laporan keuangan yang jelas.

Implementasi budaya anti-korupsi di SMP Miftahul Ulum Bunder Pancoran Bondowoso membawa dampak yang nyata dan positif terhadap seluruh elemen sekolah. Penerapan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi secara konsisten telah mengubah pola perilaku siswa, guru, dan bahkan masyarakat sekitar. Siswa menunjukkan peningkatan kedisiplinan yang signifikan, baik dalam hal kehadiran maupun penyelesaian tugas. Mereka mulai memahami bahwa setiap bentuk kecurangan, seperti menyontek atau berbohong,

merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip anti-korupsi.

Bagi guru, penerapan budaya anti-korupsi berdampak pada peningkatan profesionalisme dan kesadaran moral dalam menjalankan tugasnya. Guru menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan laporan kegiatan kelas, lebih disiplin dalam mengelola waktu, serta menghindari segala bentuk pungutan yang tidak sesuai prosedur. Kepala sekolah pun merasakan perubahan suasana kerja yang lebih kondusif karena setiap guru berkomitmen menjaga integritas pribadi dan institusional. Lingkungan kerja yang transparan membuat rasa saling percaya antarpegawai semakin kuat.

Orang tua dan masyarakat sekitar juga merasakan manfaat dari penerapan budaya anti-korupsi ini. Mereka melihat bahwa pengelolaan dana Sekolah semakin tertib dan terbuka. Setiap kegiatan yang melibatkan dana publik, seperti pembangunan fasilitas atau kegiatan ekstrakurikuler, dilaporkan secara rinci. Hal ini menumbuhkan rasa percaya dan kebanggaan masyarakat terhadap sekolah yang dikelola secara profesional dan amanah. Akibatnya, dukungan masyarakat terhadap program-program madrasah meningkat pesat.

Dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya citra positif sekolah di mata masyarakat. SMP Miftahul Ulum dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi.

KESIMPULAN

Penelitian di SMP Miftahul Ulum Bunder Pancoran Bondowoso menunjukkan bahwa strategi kepala sekolah dalam membangun budaya anti-korupsi dilakukan melalui integrasi kurikulum, keteladanan, tata kelola yang transparan, partisipasi stakeholder, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Upaya ini membuktikan bahwa kepala sekolah memiliki peran kunci dalam menciptakan budaya pendidikan yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Fathurrahman, P. (2017). Pendidikan Karakter di Madrasah. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Firmansyah, D. (2021). Transparansi Keuangan di Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 5, No. 1.
- Hasanah, S. (2019). Kebijakan Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2.
- Hidayat, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2.
- Hidayatullah, F. (2019). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Surakarta: UNS Press.
- Marzuki. (2020). Evaluasi Budaya Sekolah Berbasis Karakter. *Jurnal Tarbiyah*, Vol. 9, No. 1.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L.J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, E. (2016). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Purwanto, M. (2019). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rahman, F. (2020). Penguatan Budaya Jujur di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Integritas Pendidikan*, Vol. 8, No. 1.
- Rukiyati. (2018). *Korupsi dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Ombak.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, T. (2019). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 144.
- Syafi'i, A. (2017). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pencegahan Korupsi*. Jakarta: RajaGrafindo.

- Wibisono, H. (2021). Madrasah dan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Vol. 11, No. 3.
- Wibowo, A. (2020). *Budaya Sekolah dan Keteladanan Pemimpin*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yeni Tri Nur Rahmawati. S.Pd.I. M.Pd.I.Dosen Mata Kuliah.Pendidikan Anti Korupsi.
- Yusuf, A. (2017). *Pendidikan Karakter Islami*. Jakarta: Kencana.
- Zuhdi, M. (2018). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2.